

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
KANTOR DESA WILAYAH KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATUBARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh

**Nama : INDRIA NURANI BR. PURBA
NPM : 1405170237
Program Studi : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : INDRIA NURANI BR. PURBA
N.P.M : 1405170237
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS
LABORAN KEUANGAN PADA KANTOR DESA
WILAYAH KECAMATAN SEH-SUKA KABUPATEN
BATUBARA

Dinyatakan : (-B) *Lulus dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

Penguji II

M. FIRZA ALPI, SE, M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si, CA

Panitia Ujian

Ketua

H. JANURI, SE, MM, M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : INDRIA NURANI BR PURBA

NPM : 1405170237

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN

Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA
KANTOR DESA WILAYAH KECAMATAN SEI SUKA
KABUPATEN BATUBARA

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi

Medan, Oktober 2018

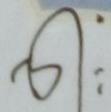
Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si, CA

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU


FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si


H. JAUHARI, SE, MM, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si
Dosen Pembimbing : Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si, CA

Nama Mahasiswa : INDRIA NURANI BR PURBA
NPM : 1405170237
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PADA KANTOR DESA WILAYAH KECAMATAN
SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA

Tanggal	Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
10/10/18	Bab 4 Deskripsi Objek penelitian Tabel diperbaiki		
12/10/18	Bab 4 & 5 Pembahasan diperparaf Bab 5 Saran & Kesimpulan		
13/10/18	Ace, Sidi, Muz, Hzi		

Pembimbing Skripsi

Dr. Hj. MAYA SARI, SE, Ak, M.Si, CA

Medan, Oktober 2018
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : INDRIA NURANI BR. PURBA
NPM : 1405170237
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PADA KANTOR DESA
WILAYAH KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN
BATUBARA

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar data-data laporan keuangan dalam skripsi dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari Kantor Desa Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.

Dan apabila ternyata di kemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil **plagiat** karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Yang membuat pernyataan



INDRIA NURANI BR. PURBA

ABSTRAK

INDRIA NURANI BR. PURBA. NPM: 1405170237. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara, 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai kantor desa kecamatan sei suka dengan sampel sebanyak 35 responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan media angket (kuesioner), metode wawancara, dan metode dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem pengendalian Intern pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Nilai *R square* yang diperoleh adalah 0,019 yang berarti bahwa besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan adalah sebesar 1,9% sedangkan sisanya yaitu sebesar 98,1 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), Kualitas Laporan Keuangan.

ABSTRACT

INDRIA NURANI BR. PURBA. NPM: 1405170237. The Influence Of The Government's Internal Control System On The Quality Of The Financial Statements In The Village Office Of Sei Suka Subdistrict Batubara District, 2018

This study aims to determine the effect of the Government Internal Control System (SPIP) on the Quality of Financial Reports in the Village Offices of Sei Suka Subdistrict, Batubara District.

This study uses an associative approach. The population in this study was the sei village office staff who liked the sample of 35 respondents. Data collection techniques used with questionnaire media (questionnaire), interview methods, and documentation methods. Data analysis techniques in this study use simple linear regression.

The results of this study indicate that the government's internal control system (SPIP) does not affect the quality of financial statements. The R square value obtained is 0.019, which means that the magnitude of the influence of the government internal control system (SPIP) on the quality of the financial statements is 1.9% while the remaining 98.1% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords : Government internal control system (SPIP), Quality of Financial Statements.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara”** ini dapat terselesaikan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan, namun dengan dukungan dari Kedua orang tua, **Ayahanda tersayang Awaluddin Purba dan Ibunda tersayang Masitah** serta adik saya **Fitria Kusuma Dewi Br. Purba dan Fazrul Alamsyah Purba** hambatan-hambatan tersebut dapat teratasi dan skripsi penelitian ini dapat selesai. Penulis menyadari bahwa hasil skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat pengetahuan, waktu, dan kemampuan yang penulis miliki.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Januri,S.E.,M.M.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Ibu Fitriani Saragih,S.E,M.Si. selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Zulia Hanum,S.E,M.Si. selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Dr.Hj.Maya Sari, SE.,Ak.,M.Si. selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan meluangkan waktu, memberikan masukan, arahan maupun koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Kepala desa serta perangkat desa di Kantor Desa yang ada di wilayah kecamatan sei suka kabupaten batubara yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian dan memberikan saya semangat sehingga terselesaikanlah skripsi penelitian ini.
7. Serta semua sahabat dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan , do'a dan semangat yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi penelitian ini, semoga skripsi penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Amin Ya Rabbal'alamin.*

Medan, Oktober 2018

Penulis

INDRIA NURANI Br. PURBA

1405170237

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRAC	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	7
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Kualitas Laporan Keuangan	8
a. Defenisi Laporan Keuangan.....	8
b. Tujuan Laporan Keuangan.....	9
c. Pengertian Kualitas	9
d. Pengertian Kualitas Laporan Keuangan	10
e. Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan	11
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	11
a. Defenisi Sistem Pengendalian Intern	11
b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern	12
c. Defenisi Sistem Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	13
d. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	15
e. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern pemerintah.....	16
f. Keterbatasan Sistem pengendalian Intern Pemerintah	20
B. Penelitian Terdahulu	22
C. Kerangka Pikir.....	24
D. Hipotesis.....	24
BAB III METODELOGI PENELITIAN	25
A. Pendekatan Penelitian	25
B. Defenisi Operasioanal	25
C. Tempat dan Waktu Penelitian	26
D. Populasi dan Sampel.	27
E. Teknik Pengumpulan Data.	29
F. Teknik Analisa Data.	29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Deskripsi Objek penelitian	35
2. Deskripsi Data Responden.....	36
3. Deskripsi Variabel penelitian	38
4. Uji Asumsi Klasik	43
5. Analisis Regresi Linier Sederhana	46
6. Pengujian Hipotesis	47
B. Pembahasan	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Daftar Penerapan SPIP	5
Tabel I.2.	Hasil Laporan Keuangan Kantor Desa	5
Tabel II.1.	Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel III.1.	Defenisi Operasional.....	26
Tabel III.2.	Waktu Penelitian	27
Tabel III.3	Populasi Penelitian	27
Tabel III.4	Sampel Penelitian.....	28
Tabel IV.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Tabel IV.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	37
Tabel IV.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	37
Tabel IV.4.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	38
Tabel IV.5.	Tabulasi Jawaban Responden SPIP	39
Tabel IV.6.	Tabulasi Jawaban Responden KLK.....	42
Tabel IV.7.	Hasil Uji Validitas SPIP	43
Tabel IV.8.	Hasil Uji Validitas KLK	44
Tabel IV.9.	Hasil Uji Reliabilitas.....	44

Tabel IV.10. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov test.....	47
Tabel IV.11. Output Uji Regresi Linier Sederhana.....	48
Tabel IV.12. Output SPSS Uji t	49
Tabel IV.13 Output SPSS Uji Koefisien Determinasi	50
Tabel IV.14. Persentase Indikator SPIP.....	52
Tabel IV.15. Persentase Indikator Kualitas Laporan Keuangan	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1.	Kerangka Pikir.....	26
Gambar IV.1.	Hasil Uji Normalitas P-Plot.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto dalam Indra Bastian 2015:6), untuk itu dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan pengawalan, maka pemerintah bersama legislatif mengesahkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa, maka pemerintah desa memiliki wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahannya secara luas dan bertanggungjawab.

Sejalan dengan kewenangan tersebut pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penererimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat

informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (SAK, 2009). Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia 2009, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Akuntansi Komitmen Organisasi menurut (Faristina Rosalind dan Warsito Kawedar 2011). Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat.

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010 tentang SAP paragraf 35 Kualitas laporan keuangan dapat diukur melalui beberapa unsur yaitu Relevan (Dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi masa lalu serta memprediksi masa depan. Andal (Dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan

material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan (Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Kemudian Dapat dipahami (Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Fenomena pelaporan keuangan pada laporan keuangan pemerintahan daerah merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Seperti yang terjadi pada bulan agustus 2018 di Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara. Tiga orang auditor diduga meminta uang sebesar Rp.3 juta terhadap Kepala Desa Durian atas nama Hariadi dalam menyelesaikan kasus ADD dan DD yang sedang dialami Kades Durian. Dalam kasus ini pihak Kapolres Batubara mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000 beserta 7 lembar Berita Acara pemeriksaan KAS desa.

Secara umum, permasalahan yang terjadi dikarenakan kelemahan sistem pengendalian intern banyak ditemukan dalam pengelolaan akun Pendapatan dan Belanja. Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai kualitas laporan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, gubernur dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian Intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 juga menjelaskan bahwa unsur sistem pengendalian intern pemerintah ada 5 yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan pengendalian intern.

Melalui penguatan SPIP, diharapkan upaya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat lebih dipacu sehingga laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah dapat memperoleh opini yang semakin baik. Sebab dengan meningkatnya opini yang diberikan BPK atas suatu laporan keuangan, berarti laporan tersebut dapat dipercaya sebagai alat pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Selain itu, SPIP yang baik dapat mencegah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat memperoleh efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara (BPK, 2014).

Apalagi mulai 2019 akan dikeluarkan peraturan bahwa Kantor Desa akan langsung diperiksa oleh BPK bukan Inspektorat lagi. Jadi, sangat penting untuk Kantor Desa di Kecamatan Sei Suka untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terutama masih ada yang belum menerapkan peraturan pemerintah ini.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di kecamatan sei suka, berdasarkan hasil wawancara serta observasi maka ini lah daftar kantor desa yang sudah menerapkan SPI dan yang belum menerapkan SPIP, antara lain sebagai berikut :

Tabel I.I
Daftar Penerapan SPIP

No.	Kantor Desa	Penerapan SPIP
1	Desa Sei Suka Deras	Sudah diterapkan
2	Desa Simpang Kopi	Sudah diterapkan
3	Desa Tanjung Gading	Belum diterapkan
4	Desa Brohol	Sudah diterapkan
5	Desa Simodong	Belum diterapkan
6	Desa Pematang Jering	Sudah ditetapkan
7	Desa Pematang Kuing	Belum diterapkan
8	Desa Kuala Tanjung	Sudah diterapkan
9	Desa Kuala Indah	Sudah diterapkan

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dimana penelitian ini merupakan pengembangan atas penelitian yang dilakukan oleh Juliani Cahya Kartika dan Eddy Budiono (2015) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Implementasi Sistem Akuntansi Instansi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan”, penelitian Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, dan Ni Kadek Sinarwati (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” dan penelitian Cipmawati Mohune dengan judul “Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.

Untuk itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Desa Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian adalah :

1. Ada beberapa kantor desa yang belum menerapkan Sistem pengendalian intern pemerintah yang terdapat dalam PP No. 60 tahun 2008

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pemahaman, kemampuan intelektual yang mempunyai kontribusi yang berarti perkembangan teori dan praktek khususnya dibidang akuntansi.
- b. Bagi Kantor desa, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi tentang pentingnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien.
- c. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar acuan/referensi dalam proses pembelajaran di bidang akuntansi maupun untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Kualitas Laporan Keuangan

1.1 Defenisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan atau instansi pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk kinerja perusahaan atau kinerja instansi. Laporan keuangan bagian dari proses pelaporan keuangan. Berikut penjelasan pengertian laporan keuangan :

Menurut Irham Fahmi (2014:2) menyatakan bahwa definisi laporan keuangan adalah :

“Suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.”

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2012 No.1 paragraf 10, menyatakan bahwa “Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Sedangkan menurut PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengemukakan bahwa :

“Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tujuan laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pemakainya guna untuk pengambilan keputusan. Berikut tujuan laporan keuangan adalah :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2012 No.1 paragraf 10, menjelaskan bahwa :

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas pengguna sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.”

1.3 Pengertian Kualitas

Menurut Iman Mulyana (2010:96) , mengemukakan bahwa Kualitas diartikan sebagai kesesuaian standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan.

Sedangkan menurut Goetsch dan Davis dalam Hessel Nogi S Tangkilisan (2007:209), pengertian kualitas sebagai berikut: “Kualitas merupakan suatu

kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.”

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah keadaan yang dapat memenuhi harapan atau tingkat baik buruknya sesuatu. Bagi suatu instansi dalam pemerintahan, kualitas dari berbagai hal perlu diperhatikan baik kualitas pegawai maupun kualitas sistem informasi pada teknologinya. Berbagai hal yang dimiliki oleh instansi pemerintahan apabila instansi tersebut berkualitas maka akan dapat memberikan nilai tambah yang menguntungkan bagi instansi tersebut.

1.4 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Pengertian kualitas laporan keuangan mendefinisikan kualitas laporan keuangan diantaranya, sebagai berikut :

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:146), menyatakan bahwa Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan.

Sedangkan menurut Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston yang dialihbahasakan oleh Sam Setyautama (2008:7), mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan adalah :

“Kualitas laporan keuangan adalah idealnya laporan keuangan harusnya mencerminkan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Informasinya harus berguna untuk menilai masa lalu dan masa yang akan datang. Semakin tajam dan semakin jelas gambar yang disajikan lewat data *financial*, dan semakin mendekati kebenaran.”

1.5 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mursyidi (2013:47), menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

2.1 Defenisi Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan efisien, kualitas pelaporan keuangan, pengaman asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatuhan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Definisi Sistem Pengendalian intern menurut Mulyadi (2010:163)

mengemukakan:

“Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kualitas data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.”

Definisi pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organization treadway Commision (COSO)*, yang dikutip oleh Azhar Susanto (2010:103) adalah sebagai berikut:

“Pengendalian intern didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan karyawan yang dirancang untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai, ketaatan terhadap undang-undang yang berlaku”.

Adapun tujuan Sistem Pengendalian Intern yaitu dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku seperti yang tertera dalam pengertian pengendalian menurut COSO (*Committee of Sponsoring Organization treadway Commision*).

2.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Menurut Azhar Susanto (2013:95) tujuan pengendalian intern, yaitu:

1. Efisiensi dan efektifitas operasi
2. Penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya
3. Ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku.”

Menurut Mardiasmo (2009:59) tujuan pengendalian intern, yaitu:

1. Menjaga keamanan pemilik perusahaan
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan
4. Membantu menjaga kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Tujuan tersebut mengisyaratkan bahwa jika dilaksanakan dengan baik dan benar, Sistem Pengendalian Intern (SPI) akan memberi jaminan dimana seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai di instansi pemerintah, akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara. Ini dapat dibuktikan, misalnya, melalui laporan keuangan pemerintah yang handal dan mendapat predikat wajar tanpa pengecualian.

2.3 Defenisi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diatur dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan peraturan pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah seharusnya dilandasi dengan pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Pengertian utama tentang sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Selama ini acuan penerapan Sistem Pengendalian Intern pada instansi pemerintah adalah pengawasan melekat yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan dan pengawasan, instruksi presiden No. 01 tahun 1989 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat, yang telah disempurnakan melalui keputusan Menteri PAN No. 30 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004.

Definisi pengawasan melekat menurut Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004 tentang petunjuk pelaksanaan Melekat dalam penyelenggaraan pemerintah adalah sebagai berikut:

“Pengawasan melekat yang merupakan padanan istilah pengendalian manajemen atau pengendalian intern dan selanjutnya disebut waskat adalah segala upaya yang dilakukan dalam suatu organisasi untuk mengarahkan suatu kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis, segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi, data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar, serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku”.

Terminologi pengawasan melekat dalam aturan tersebut disepadankan dengan pengendalian manajemen atau pengendalian intern. Unsur-unsur pengawasan yang melekat yang dimaksud adalah pengorganisasian personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervise, dan review intern.

Adapun pengertian sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang diciptakan manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah”.

Senada dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, mendefinisikan sistem pengendalian sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian, efektifitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan”.

Sedangkan sistem pengendalian intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah sebagai berikut:

“Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

2.4 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Esensi dari organisasi yang dikendalikan dengan efektif terletak pada setiap manajemen, jika manajemen puncak merasa bahwa pengendalian intern itu penting maka anggota dalam organisasi akan merasakan hal itu dan bereaksi dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Di lain pihak, jika pengendalian intern tidak dijadikan kepentingan utama manajemen puncak dan hanya dijadikan lip service maka dapat dipastikan bahwa tujuan pengendalian intern tidak dapat dicapai dengan efektif. Menurut

tujuannya pengendalian intern dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi akan dapat dicapai melalui efisiensi dan efektifitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan ketaatan terhadap undang-undang dan aturan yang berlaku seperti yang tertera dalam pengertian pengendalian menurut COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway Commision).

Sedangkan tujuan pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang :

- “1. Tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara.
2. Keandalan Pelaporan Keuangan.
3. Pengamanan Aset Negara.
4. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan”.

2.5 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Agar mencapai pengendalian intern yang memadai maka diperlukan beberapa komponen pengendalian intern seperti yang diungkapkan COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway), penelitian COSO (Committee of Sponsoring Organization treadway) mengatakan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang diimplementasikan oleh dewan komisaris, pihak manajemen, dan mereka yang ada dibawah arahan keduanya untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian dapat tercapai. Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar, bukan absolute, karena kemungkinan kesalahan manusia, kolusi, dan penolakan manajemen atas proses pengendalian membuat proses ini menjadi tidak sempurna.

Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri atas unsur :

- “1. Lingkungan Pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern”.

Berdasarkan kelima komponen SPIP tersebut dapat diketahui bahwa komponen lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk keseluruhan komponen. Sedangkan komponen informasi dan komunikasi merupakan saluran (*channel*) terhadap ketiga komponen pengendalian lainnya (Mahmudi 2010: 22). Penerapan unsure-unsur sistem pengendalian intern pemerintah dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Berikut penjabaran komponen SPIP :

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian intern terdiri dari :

- a. Penegakan integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi pemerintah.

2. Penilaian Risiko

Komponen kedua dari sistem pengendalian intern pemerintah adalah penilaian risiko. Dalam rangka penilaian risiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi resiko
- b. Analisis resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah menetapkan:

- a) Tujuan Instansi Pemerintah
- b) Tujuan pada tingkat kegiatan
- c) Identifikasi Risiko

Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat resiko yang dapat diterima.

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan kegiatan pengendalian dalam instansi sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya terdiri atas :

- a. Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
- b. Pembinaan sumber daya manusia;
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. Pengendalian fisik atas aset;
- e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. Pemisahan fungsi;
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian yang penting;
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan

komunikasi yang efektif, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan pemerintah wajib melakukan pemantauan sistem pengendalian intern. Pemantauan sistem pengendalian intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.

2.6 Keterbatasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Kehadiran pengendalian intern pemerintah hanya dapat memberikan keyakinan memadai bagi manajemen atau pimpinan pemerintah berkaitan dengan pencapaian tujuan pengendalian intern entitas. Kemungkinan pencapaian tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan bawaan yang melekat dalam pengendalian intern sangatlah besar.

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Indra Bastian (2010:10) adalah sebagai berikut:

“Tidak ada sistem pengendalian intern yang dengan sendirinya dapat menjamin administrasi yang efisien serta kelengkapan dan akurasi pencatatan. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh:

1. Pengendalian intern yang bergantung pada penilaian fungsi dapat dimanipulasi dengan kolusi
2. Otorisasi dapat diabaikan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu atau manajemen

3. Personel keliru dalam memahami perintah sebagai akibat dari kelalaian tidak diperhatikan maupun kelelahan.”

Azhar Susanto (2008:10) menyatakan bahwa terdapat beberapa keterbatasan sistem pengendalian intern yang disebabkan oleh:

1. “Kesalahan Manusia (*Human error*) Yaitu kesalahan yang muncul ketika karyawan melakukan pertimbangan yang salah atau perhatiannya selama bekerja terpecah.
2. Penyimpangan Manajemen Karena manajer atau suatu organisasi memiliki lebih banyak otoritas dibandingkan karyawan biasa, proses pengendalian efektif pada tingkat manajemen bawah dan tidak efektif pada tingkat atas.
3. Kolusi (*Collusion*) Kolusi terjadi ketika dua atau lebih karyawan berkonspirasi untuk melakukan pencurian (korupsi) ditempat mereka kerja.
4. Manfaat dan Biaya (*Cost and Benefit*) Konsep jaminan yang meyakinkan atau masuk akal mengandung arti bahwa biaya pengendalian internal tidak melebihi manfaat yang dihasilkannya. Pengendalian yang masuk akal adalah pengendalian yang menghasilkan manfaat yang lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengendalian tersebut.”

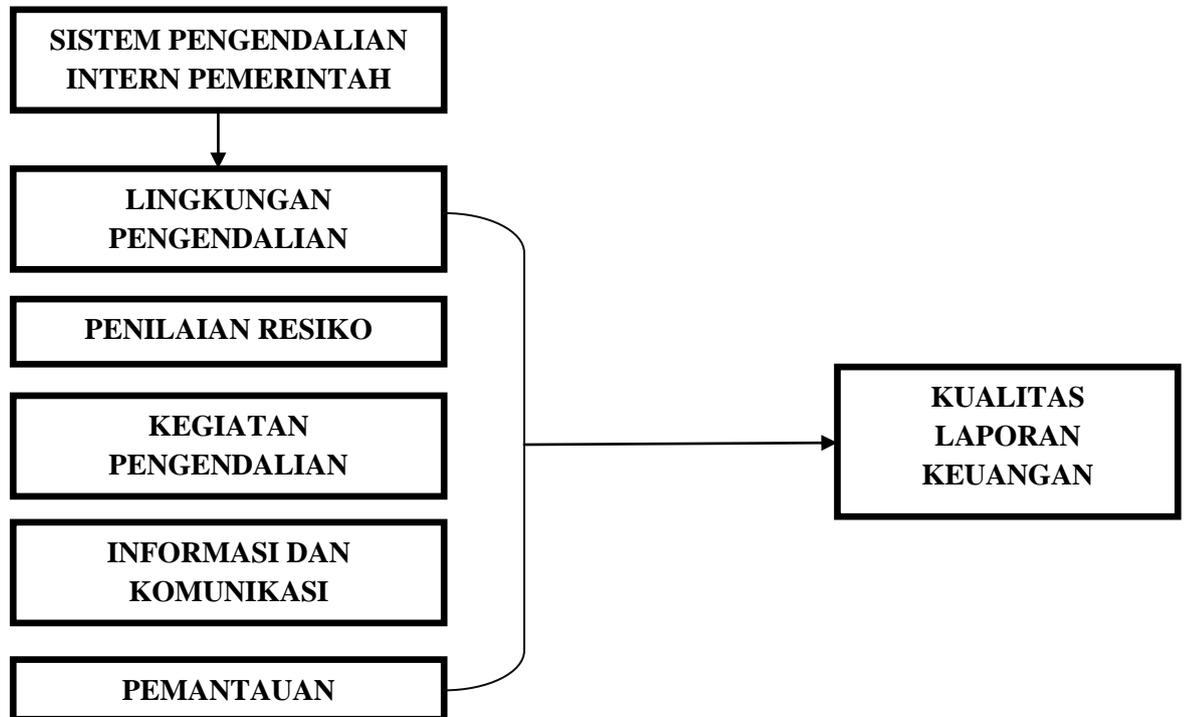
B. Penelitian Terdahulu

Untuk memberikan kejelasan mengenai penelitian yang dilakukan, maka berikut akan disajikan penelitian terdahulu yaitu :

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil
1	Indriya Kartika (2015)	Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas keuangan. (Penelitian pada laporan realisasi anggaran di pemerintah daerah kabupaten wilayah provinsi jawa barat)	1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan koefisien determinasi 69,90%. 3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan kualitas laporan Keuangan berpengaruh positif Terhadap akuntabilitas keuangan dengan koefisien determinasi 64,10%.
2	Cipmawati Mohune (2013)	Pengaruh penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten gorontalo)	Penerapan sistem informasi manajemen daerah bernilai positif sebesar 0,665. Koefisien regresi yang positif ini menunjukkan bahwa SIMDA mempunyai pengaruh yang positif terhadap kualitas laporan keuangan.
3	Dewi Andini dan Yusrawati (2015)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan)	A. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial variable kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. B. Berdasarkan pengujian secara simultan kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD di kabupaten Empat Lawang
4	Assyifa Nurillah (2014)	Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan	Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan

		daerah (SAKD), pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD kota Depok)	daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
5	Kadek Desiana Wati. Nyoman Trisna Herawati dan Ni Kadek Sinarwati (2014)	Pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah	Hasil pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan SAP, dan sistem akuntansi keuangan daerah, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
6	Udi Kuncoro (2017)	Pengaruh sumber daya manusia dan penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah	A. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah B. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIMDA berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
7	Risma Sri Mutiarani (2016)	Pengaruh kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada pemerintah daerah kota serang-banten)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

C. Kerangka Pikir



Gambar II.1

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H0 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

H1 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang menjelaskan tentang seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Situmorang dan Ginting, 2008 : 57). Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan adanya pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kantor Desa di Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini adalah :

a. Variabel Dependenden

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

b. Variabel Independenden

Kualitas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar yang berlaku, serta akurat tentang kondisi keuangan

yang berisi informasi masa lalu maupun masa yang akan datang yang hasil akhirnya memberikan sebuah pendapat dari pihak yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut.

Tabel III.1
Defenisi Operasional

Jenis Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (X)	sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat dan pemerinta deaerah	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan pengendalian intern	Likert
Kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami	Likert

Sumber : Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah RI No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Paragraf 35)

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Kelurahan Wilayah Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara.

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Mei 2018 sampai dengan Oktober 2018 perincian dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 2
Pelaksanaan Waktu Penelitian

No	Jenis Kegunaan	Mei'18				Juni'18				Juli'18				Agust'18				Sept'18				Okt'18			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Penyusunan proposal																								
3	Bimbingan proposal																								
4	Seminar proposal																								
5	Pengumpulan data																								
6	Bimbingan skripsi																								
7	Sidang skripsi																								

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kantor desa/kelurahan Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara yang berjumlah 9 Kantor Desa.

Tabel III.3

Jumlah Populasi Kantor Desa Kecamatan Sei Suka

No.	Kantor Desa/Kelurahan
1	Desa Sei Suka Deras
2	Desa Simpang Kopi
3	Desa Tanjung Gading
4	Desa Brohol
5	Desa Simodong
6	Desa Pematang Jering
7	Desa Kuala Indah
8	Desa Kuala Tanjung
9	Desa Pematang Kuing

2. Sampel

Metode pemilihan sampel pada penelitian ini, yaitu metode *simple random sampling*. *Simple random sampling* merupakan teknik pengambilan sample yang langsung dilakukan pada unit *sampling* (Margono, 2010:126). Margono (2007:123) juga menyatakan bahwa penetapan besar-kecilnya sampel tidaklah ada suatu ketetapan yang mutlak, artinya tidak ada suatu ketentuan berapa persen suatu sampel harus diambil. Sampel dari penelitian ini diambil dari desa yang memberikan kelengkapan data sebagai dasar dari penelitian ini.

Tabel III.4

Jumlah Sampel Kantor Desa Kecamatan Sei Suka

No.	Kantor Desa	Kelengkapan Data
1	Desa Sei Suka Deras	Lengkap
2	Desa Simpang Kopi	Tidak lengkap
3	Desa Tanjung Gading	Tidak lengkap
4	Desa Brohol	Tidak lengkap
5	Desa Simodong	Tidak lengkap
6	Desa Pematang Jering	Tidak lengkap
7	Desa Kuala Indah	Lengkap
8	Desa Kuala Tanjung	Tidak lengkap
9	Desa Pematang Kuing	Tidak lengkap

Sampel yang penulis ambil adalah kantor desa yang memberikan data lengkap yaitu data laporan keuangan. Sehingga kantor yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Sei Suka Deras, dan Kantor Desa Kuala Indah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Kuisisioner yaitu dengan menyebarkan angket yang berisi pertanyaan kepada seluruh responden pada penelitian ini yaitu pengguna laporan keuangan.
2. Observasi, melakukan penelitian dengan pengamatan langsung dengan cara mendekati objek yang akan diteliti.

3. Wawancara, melakukan penelitian dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak terkait dan berkompeten dengan permasalahan yang penulis teliti.
4. Dokumentasi, melakukan penelitian dengan melihat data laporan keuangan yang dimiliki setiap kantor desa.

F. Analisa Data

Pengolahan data penelitian ini menggunakan *software SPSS for windows 24.0*. pengolahan data dilakukan dalam beberapa tahap pengujian. Pengujian yang pertama adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian dengan demografi responden. Statistik deskriptif menjelaskan skala jawaban responden pada setiap variabel yang diukur dari minimum, maksimum rata-rata dan standar deviasi, juga untuk mengetahui demografi responden yang terdiri dari kategori, jenis kelamin, pendidikan, umur, posisi dan lama bekerja (Ghozali, 2009: 19)

Pengujian yang kedua adalah pengujian instrumen penelitian. Pengujian tersebut adalah :

1. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk menguji validitas adalah dengan mengkorelasi item-item total, yakni dengan mengkorelasikan skor-skor suatu item angket dengan totalnya. Pengujian

menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (dk)= n-2, dk= 35-2= 33. Maka r_{tabel} adalah 0,334.

Adapun kriteria pengujian menurut Azuar Juliandi, dkk (2015) adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) > R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan valid.
2. Jika nilai *pearson correlation* (R_{hitung}) < R_{tabel} maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menurut Ghozali (2016) adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruk. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner). Kuesioner yang reliabel adalah kuesioner yang apabila dicobakan berulang-ulang pada kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama, cara mengukurnya dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dimana pada pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Jika nilai *Cronbach Alpha* pada kuisisioner > 0,334/0,6 maka variabel tersebut dinyatakan reliabel (Ghozali, 2016).

c. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau

tidak (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas data tersebut dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu menggunakan Uji Kolmogorof-Smirnov (Uji K-S), grafik histogram dan kurva penyebaran P-Plot. Untuk Uji K-S yakni jika nilai hasil Uji K-S > dibandingkan taraf signifikansi 0,05 maka sebaran data tidak menyimpang dari kurva normalnya itu uji normalitas. Sedangkan melalui pola penyebaran PPlot dan grafik histogram, yakni jika pola penyebaran memiliki garis normal maka dapat dikatakan data berdistribusi normal(Ghozali, 2016).

2. Persamaan Regresi Linier Sederhana

Regresi linier sederhana merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan memprediksi variabel terikat dengan menggunakan variabel bebas.

Pendapat lain menurut Gujarati dalam Jonathan Sarwono mendefenisikan analisis regresi sebagian kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan (*the explained variabel*) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (*the explanatory*). Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut sebagai variabel bebas.

Metode regresi linier sederhana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh antara variabel bebas (*independemt*) dengan variabel terikat (*dependent*). Metode ini juga bisa digunakan sebagai ramalan, sehingga dapat diperkirakan antara baik atau buruknya suatu variabel X terhadap naik turunnya suatu tingkay variabel Y, begitu pun sebaliknya. Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Dimana :

Y = Kualitas laporan keuangan pemerintah

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

X = Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)

e = Faktor kesalahan atau *error*

3. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Hasil uji t_{hitung} ini ada pada output perangkat lunak, dapat dilihat pada tabel *coefficient level of significance* yang digunakan sebesar 5% atau $(\alpha) = 0,05$. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel independen secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Analisis ini dapat juga memberikan informasi tentang kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat r^2 nya. Variabel yang memenuhi r^2 terbesar adalah variabel independen yang mempunyai pengaruh dominan.

b. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Imam Ghozali, 2011). Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Untuk melihat besarnya kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dihitung dengan rumus:

$$D = R^2 \times 100\%$$

Keterangan:

D = Koefisien determinasi

R^2 = Koefisien korelasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Objek Penelitian

Kantor Desa Sei Suka Deras sudah ada sejak tahun 1970-an yang beralamat di Jl. Nanas Siam Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. Kantor desa Kuala Indah sudah ada sejak tahun 1995 yang beralamat di Jl. Datuk Panglima Tenggang No. 33 Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. Kedua kantor desa ini merupakan unit kerja dibawah naungan inspektorat pemerintah, dan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan kepada masyarakat.

Visi Kantor Desa Sei Suka Deras adalah menjadi pelayan masyarakat yang baik dan dapat dipercaya untuk meningkatkan pembangunan di desa sei suka deras. Misi Kantor Desa Sei Suka Deras adalah untuk meningkatkan pembangunan dengan memanfaatkan dana desa yang diberikan pemerintah.

Visi Kantor Desa Kuala Indah sendiri adalah menjadi pelayan masyarakat yang siap mendengarkan keluhan masyarakat dengan meningkatkan pembangunan, pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak, membangun jiwa kewirausahaan masyarakat yang ada di kuala indah. Misi Kantor Desa Kuala Indah adalah untuk meningkatkan visi yang telah dijelaskan dengan cara melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur, membuka Paud/Tk serta membuka usaha pembuatan tas dan lain-lain dari barang bekas yang bisa digunakan untuk masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.

Kedua kantor desa ini merupakan dua dari beberapa kantor yang terus mengikuti perubahan peraturan pemerintah dengan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

2. Deskripsi data responden

Pada penelitian ini penulis menyebar kuesioner kepada responden yaitu sebanyak 35 orang. Deskripsi data responden digunakan untuk mengetahui data pribadi atau karakteristik responden berdasarkan Jenis kelamin, Usia, Pendidikan, dan Jenis Pekerjaan. Berikut ini merupakan karakteristik responden berdasarkan:

a) Jenis kelamin

Tabel IV.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	27	77%
Perempuan	8	23%
Total	35	100%

Berdasarkan Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 27 orang (77%) dan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 8 orang (23%).

b) Usia

Tabel IV.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
19-28	5	14%
29-38	8	23%
39-48	13	37%
>49	9	26%
Total	35	100%

Berdasarkan Tabel IV.2 diatas dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar usia antara 19-28 tahun sebanyak 5 orang (14%), dilanjutkan dengan usia 29-38 tahun sebanyak 8 orang (23%), dilanjutkan dengan usia 39-48 tahun sebanyak 13 orang (37%), dan yang berusia >48 sebanyak 9 orang (26%).

c) Pendidikan

Tabel IV.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	31	88%
Diploma	2	6%
Sarjana (S1)	2	6%
Total	35	100%

Berdasarkan Tabel IV.3 diatas menunjukkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar di tingkat pendidikan Sarjana yaitu sebanyak 2 orang (6%), jenjang pendidikan Diploma sebanyak 2 orang (6%), dan jenjang pendidikan SMA sebanyak 31 orang (88%).

d) Pekerjaan

Tabel IV.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
PNS	1	3%
Honor	34	97%
Total	35	100%

Berdasarkan Tabel IV.4 diatas menunjukkan bahwa pekerjaan responden dalam penelitian ini paling banyak adalah Honor yaitu sebanyak 33 orang (97%), dan yang bekerja PNS hanya 2 orang (3%).

3. Deskripsi Variabel Penelitian

Deskripsi variabel penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y). Deskripsi dari setiap pertanyaan masing-masing variabel menampilkan jawaban responden dengan penilaian skala *likert*.

a. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Berikut merupakan tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan jumlah 13 pertanyaan:

Tabel IV.5

Tabulasi Jawaban Responden Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

No. Item	Jawaban Responden											
	Sangat Setuju (5)		Setuju (4)		Netral (3)		Tidak Setuju (2)		Sangat Tidak Setuju (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	17	48	12	34	6	18	0	0	0	0	35	100
2	10	28	18	51	6	18	1	3	0	0	35	100
3	9	26	17	48	9	26	0	0	0	0	35	100
4	7	20	17	48	11	32	0	0	0	0	35	100
5	13	37	15	43	7	20	0	0	0	0	35	100
6	11	32	18	51	6	17	0	0	0	0	35	100
7	13	37	11	32	11	31	0	0	0	0	35	100
8	7	20	19	54	9	26	0	0	0	0	35	100
9	10	28	20	57	5	15	0	0	0	0	35	100
10	13	37	11	31	7	20	4	12	0	0	35	100
11	13	37	16	46	6	17	0	0	0	0	35	100
12	12	34	18	51	5	15	0	0	0	0	35	100

Sumber: Data Primer yang diolah,2018.

Berdasarkan Tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden mengenai kantor desa menerapkan kode etik secara tertulis, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 17 orang.
- 2) Jawaban responden mengenai kantor desa mempertahankan karyawan yang kompeten, mayoritas pendapat responden adalah

setuju yaitu 18 orang.

- 3) Jawaban responden mengenai kantor desa menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 17 orang.
- 4) Jawaban responden mengenai kantor desa mempertimbangkan potensi penipuan dalam menilai resiko, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 17 orang.
- 5) Jawaban responden mengenai kantor desa mampu mengidentifikasi perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi sistem pengendalian intern, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 15 orang.
- 6) Jawaban responden mengenai kantor desa menerapkan pemisahan tugas yang memadai, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 18 orang.
- 7) Jawaban responden mengenai kantor desa menerapkan sistem informasi untuk melaksanakan tanggung jawab, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 13 orang.
- 8) Jawaban responden mengenai kantor desa mempertimbangkan materialitas terhadap angka-angka transaksi, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 19 orang.
- 9) Jawaban responden mengenai transaksi yang dicantumkan telah diklarifikasi dengan tepat, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 20 orang.
- 10) Jawaban responden mengenai dalam waktu yang tidak ditentukan

pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 13 orang.

11) Jawaban responden mengenai auditor memeberikan saran-saran mengenai tersajinya laporan keuangan yang wajar, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 16 orang.

12) Jawaban responden mengenai kantor desa memiliki rancangan struktur pengendalian intern yang baik, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 18 orang.

b. Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Berikut adalah tabel frekuensi hasil skor jawaban responden mengenai kualitas laporan keuangan dengan jumlah 9 pertanyaan:

Tabel IV.6
Tabulasi Jawaban Responden Kualitas Laporan Keuangan

No. Item	Jawaban Responden											
	Sangat Setuju (5)		Setuju (4)		Netral (3)		Tidak Setuju (2)		Sangat Tidak Setuju (1)		Total	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	24	68	11	32	0	0	0	0	0	0	35	100
2	20	57	15	43	0	0	0	0	0	0	35	100
3	19	54	16	46	0	0	0	0	0	0	35	100
4	6	17	29	83	0	0	0	0	0	0	35	100
5	25	71	10	29	0	0	0	0	0	0	35	100

Sumber: Data primer yang diolah,2018.

Berdasarkan tabulasi jawaban responden diatas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Jawaban responden mengenai laporan keuangan yang dihasilkan oleh kantor desa memberikan informasi yang dapat mengoreksi ekspektasi di masa lalu, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 24 orang.
- 2) Jawaban responden mengenai kantor desa menyajikan laporan keuangan secara lengkap , mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 20 orang.
- 3) Jawaban responden mengenai transaksi yang disajikan tergambar dengan jujur, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 19 orang.
- 4) Jawaban responden mengenai informasi keuangan yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, mayoritas pendapat responden adalah setuju yaitu 29 orang.
- 5) Jawaban responden mengenai informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna, mayoritas pendapat responden adalah sangat setuju yaitu 25 orang.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Validitas Data

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalidan model regresi. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan menguji kevalidan setiap pertanyaan pada kuisioner dengan mengkorelasi item-item total, yakni dengan mengkorelasi

skor-skor suatu item angket dengan totalnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan derajat kebebasan (dk)= n-2, dk= 35-2= 33. Maka r_{tabel} adalah 0,334. Berikut merupakan hasil uji validitas dengan menggunakan program SPSS versi 24 :

Tabel IV. 7

Hasil Uji Validitas Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X)

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation / r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,497	0,334	Valid
2	0,411	0,334	Valid
3	0,629	0,334	Valid
4	0,626	0,334	Valid
5	0,618	0,334	Valid
6	0,447	0,334	Valid
7	0,473	0,334	Valid
8	0,343	0,334	Valid
9	0,346	0,334	Valid
10	0,491	0,334	Valid
11	0,603	0,334	Valid
12	0,506	0,334	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2018.

Berdasarkan tabel IV. 7, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki status valid, karena nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) > r_{tabel} sebesar 0,334.

Tabel IV. 8

Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation / r_{hitung}	r_{tabel}	Kriteria
1	0,504	0,334	Valid
2	0,609	0,334	Valid
3	0,491	0,334	Valid
4	0,513	0,334	Valid
5	0,426	0,334	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2018.

Berdasarkan tabel IV.8, maka dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel kualitas laporan keuangan memiliki status valid, karena nilai r_{hitung} (*Corrected Item-Total Correlation*) > r_{tabel} sebesar 0,334.

b. Reliabilitas Data

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Cara menghitung tingkat reliabilitas suatu data yaitu dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* Reliabilitas merupakan tingkat keandalan alat ukur (kuesioner). pengujian reliabilitas ini menggunakan bantuan komputer program SPSS. Berikut merupakan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS versi 24 :

Tabel IV. 9

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	r_{α}	r_{tabel}	Kriteria
1	SPIP	0,721	0,334	Reliabel
2	Kualitas Laporan Keuangan	0,279	0,334	Tidak Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah

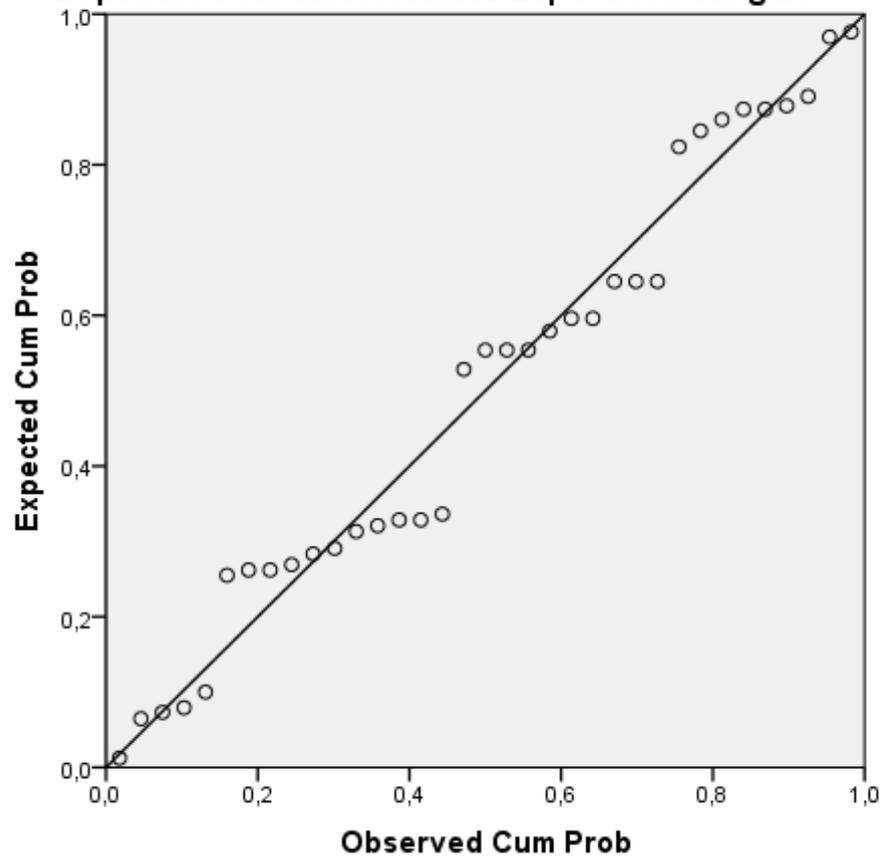
Berdasarkan tabel IV.9, uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi hasil koefisien reliabilitas instrument sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar $r_{ll} = 0,721$ ternyata memiliki nilai "*Alpha Cronbach*" $> r_{\text{tabel}} / r_{\text{kritis}}$ yang berarti instrument sistem pengendalian intern pemerintah dinyatakan reliable/konsisten. Sedangkan hasil koefisien instrument kualitas laporan keuangan adalah sebesar $r_{ll} = 0,279$ ternyata memiliki nilai "*Alpha Cronbach*" $< r_{\text{tabel}} / r_{\text{kritis}}$ yang berarti instrument kualitas laporan keuangan dinyatakan tidak reliable/tidak konsisten.

c. Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui kenormalan model regresi. Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan uji Normal P-Plot dan *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S). Pada uji Normal P-Plot data berdistribusi normal apabila data tersebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Sedangkan pada *Kolmogorov Smirnov Test* (K-S) data berdistribusi normal apabila nilai probabilitas $> 0,05$. Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan program SPSS versi 24 :

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan



Sumber: Output SPSS,2018.

Gambar IV.1

Hasil Uji Normalitas P-Plot

Berdasarkan Hasil Uji Normal P-Plot diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Untuk lebih mendukung uji grafik Normal P-Plot diatas, maka dilakukan pengujian normalitas dengan *Kolmogorov Smirnov Test (K-S)*.

Tabel IV.10

Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,17687381
Most Extreme Differences	Absolute	,123
	Positive	,123
	Negative	-,109
Test Statistic		,123
Asymp. Sig. (2-tailed)		,199 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS,2018

Berdasarkan Tabel IV.10 diatas, dapat diketahui bahwa hasil dari uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai probabilitas atau asymp. Sig (2 tailed) sebesar 0,199 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

5. Analisis Regresi Linier Sederhana

Persamaan regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen (sistem pengendalian intern pemerintah) terhadap variabel dependen (kualitas laporan keuangan). Pengujian ini menggunakan alat bantu program SPSS versi 24. Berikut adalah tabel hasil uji regresi linier sederhana :

Tabel IV.11
Output Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a						
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t	Sig.	
		B	Std. Error			Beta
1	(Constant)	23,940	2,238		10,696	,000
	SPIP	-,026	,046	-,097	-,563	,577

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: Output SPSS,2018.

Berdasarkan Tabel IV.11 diatas, menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 23,940. Dari hasil analisis regresi tersebut dapat diketahui persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 23,940 + (-0,026)X$$

Persamaan regresi linier sederhana tersebut menunjukkan nilai α adalah 23,940 dan nilai β adalah -0,026X. Berdasarkan dari hasil tersebut menyimpulkan bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kualitas laporan keuangan yaitu sebesar -0,026.

6. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel independen secara parsial mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Pengujian ini menggunakan tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dan $dk = n - 2 = 33$, maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2,0345. Berikut adalah hasil output uji t dengan

menggunakan program SPSS versi 24 sebagai berikut :

Tabel IV.12
Output SPSS Uj- t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23,940	2,238		10,696	,000
	SPiP	-,026	,046	-,097	-,563	,577

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan
Sumber: Output SPSS,2018.

Adapun kriteria penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang antara variabel independen terhadap variabel dependen.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil output uji-t, menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar -0,563, yang artinya $t_{hitung} -0,563 < t_{tabel} 2,0345$, dan menghasilkan nilai signifikansi $0,577 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen (sistem pengendalian intern pemerintah) terhadap variabel

dependen (kualitas laporan keuangan). Berikut adalah hasil output pengujian dengan koefisien determinasi dengan bantuan program SPSS versi 24 :

Tabel IV.13

Output SPSS Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,097 ^a	,010	-,021	1,19457

a. Predictors: (Constant), SPIP

b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan

Sumber: Output SPSS,2018.

Berdasarkan Tabel IV.13 diatas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi atau *R square* adalah sebesar 0,010 atau 1%, yang berarti bahwa variabel independen (sistem pengendalian intern pemerintah) tidak mempengaruhi variabel dependen (kualitas laporan keuangan) sebesar 1%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 99% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Menurut Faristina Rosalind dan Warsito Kawedar (2011) menyatakan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi keandalan laporan keuangan adalah Kualitas Sumber Daya

Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Akuntansi Komitmen Organisasi.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dapat dibuktikan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,577 >$ dari $0,05$, yang artinya tidak ada pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Besarnya nilai koefisien regresi menunjukkan arah hubungan yang negatif yaitu sebesar $-0,026X$ dengan bilangan konstanta $43,391$. Persamaan garis regresinya adalah $Y = 23,940 + (-0,026)X$. Hal ini berarti dengan adanya sistem pengendalian intern pemerintah belum tentu dapat menghasilkan kualitas laporan keuangan yang efektif dan efisien.

Selain itu nilai koefisien determinasi atau *R square* yang diperoleh adalah sebesar $0,010$ atau 1% , yang berarti bahwa variabel independen (sistem pengendalian intern pemerintah) tidak mempengaruhi variabel dependen (kualitas laporan keuangan) sebesar 1% sedangkan sisanya yaitu sebesar 99% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sistem pengendalian intern pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan tetapi dominan terhadap kualitas laporan keuangan karena sistem pengendalian intern pemerintah.

Dilihat dari persentase jawaban responden mengenai SPIP :

Tabel IV. 14

Persentase Indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No. Item	Jawaban Responden										
	Sangat Setuju 5		Setuju 4		Netral 3		Tidak Setuju 2		Sangat Tidak Setuju 1		total
	F	Skor	F	Skor	F	skor	F	skor	F	skor	
1	17	85	12	48	6	18	0	0	0	0	86
2	10	50	18	72	6	18	1	2	0	0	81
3	9	45	17	68	9	27	0	0	0	0	80
4	7	35	17	68	11	33	0	0	0	0	78
5	13	65	15	60	7	21	0	0	0	0	83
6	11	55	18	72	6	18	0	0	0	0	83
7	13	65	11	44	11	33	0	0	0	0	81
8	7	35	19	76	9	27	0	0	0	0	79
9	10	50	20	80	5	15	0	0	0	0	83
10	13	65	11	44	7	21	4	8	0	0	79
11	13	65	16	64	6	18	0	0	0	0	84
12	12	60	18	72	5	15	0	0	0	0	84

Jawaban dari responden untuk beberapa indikator dari setiap dimensi yang ada memberikan kesimpulan bahwa tidak semua indikator itu tidak berpengaruh. Dari hasil persentase rata-rata indikator pada variabel X yang paling rendah adalah jawaban responden pada dimensi penilaian resiko dengan pernyataan no. 4. Sehingga hanya dimensi penilaian resiko saja yang tidak berpengaruh terhadap

kualitas laporan keuangan yang disebabkan sedikitnya responden yang menjawab sangat setuju.

Dilihat dari persentase jawaban responden mengenai Kualitas laporan keuangan :

Tabel IV. 15

Persentase Indikator Kualitas Laporan Keuangan

No. Item	Jawaban Responden										Total
	Sangat Setuju 5		Setuju 4		Netral 3		Tidak Setuju 2		Sangat Tidak Setuju 1		
	F	skor	F	skor	F	skor	F	skor	F	skor	%
1	24	120	11	44	0	0	0	0	0	0	94
2	20	100	15	60	0	0	0	0	0	0	91
3	19	95	16	64	0	0	0	0	0	0	91
4	6	30	29	116	0	0	0	0	0	0	83
5	25	125	10	40	0	0	0	0	0	0	94

Jawaban dari responden untuk beberapa indikator dari setiap dimensi yang ada memberikan kesimpulan bahwa tidak semua indikator itu dipengaruhi. Dari hasil persentase rata-rata indikator pada variabel Y yang paling rendah adalah jawaban responden pada dimensi dapat dibandingkan dengan pernyataan no. 4. Sehingga hanya dimensi dapat dibandingkan indikator 4 yang tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah yang disebabkan sedikitnya responden yang menjawab sangat setuju.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah yang dibahas sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat pengaruh yang positif maupun signifikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Desa Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara. Berdasarkan *R square* yang diperoleh sebesar 0,010 atau 1%, yang berarti bahwa tidak ada pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sisanya sebesar 99% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian juga diperoleh bahwa hanya dimensi penilaian resiko yang terdapat dalam sistem pengendalian intern pemerintah saja yang tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, dan hanya dimensi andal saja yang tidak dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah dikarenakan sedikitnya jawaban responden yang menjawab sangat setuju dan lebih dominan pada jawaban setuju.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Kantor desa sei suka deras dan kuala indah hendaknya melakukan sosialisasi kembali mengenai sistem pengendalian intern pemerintah

terutama pada penilaian resiko agar laporan keuangan yang dihasilkan andal, dapat dibandingkan serta efektif dan efisien.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin menggunakan judul penelitian ini sebaiknya menambah jumlah variabel, serta sampel agar jawaban yang dihasilkan oleh peneliti selanjutnya lebih akurat dan memperluas objek penelitian agar mendapatkan perbandingan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

<https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan>

<http://laportadoradesuenos.blogspot.co.id/2014/12/pengertian-laporan-keuangan-menurut.html>

<http://belajartanpabuku.co.id/2013/04/penyusunan-laporan-keuangan-akuntansi.html>

Alimbudiono, Ria Sandra dan Fidelis Arastyo Andono. 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia sub bagian Akuntansi Pemerintah Daerah “XYZ” dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada Masyarakat : Renungan bagi Akuntan Pendidik*”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol.05.02. hal. 18- 30

Nadhira. 2016 Skripsi Akuntansi : *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajaemen Daerah (SIMDA) Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey pada Desa di Wilayah Kecamatan Margahayu dan Kecamatan Katapang)*”.

Andini, Dewi dan Yusrawati. 2015. *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penetapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*”. Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Vol 24 No. 1. Universitas Islam Riau.

Udi Kuncoro. 2017 Skripsi Akuntansi Universitas Lampung : *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.

Cipmawati Mohune. 2014. *Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)*”. Jurnal.

Nurun Nafidah. 2015. Skripsi Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah : *Pengaruh Kinerja Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka Pada Perpustakaan Universitas Indonesia*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 8 tahun 2013 tentang Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Menteri PAN No. 30 tahun 1994 tentang petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri PAN No. KEP/46/M.PAN/2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.56 tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.